

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dari penelitian kualitatif dihasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan deskriptif merupakan sebagai metode yang menggambarkan dan membahas apa yang diteliti kemudian dianalisis berdasarkan data yang ada dan menarik kesimpulan. Metode deskriptif memberikan batasan sebagai berikut:

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis

Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari suatu individu, masyarakat, maupun suatu kebijakan dalam menganalisis dan memperoleh gambaran tentang seberapa besar kontribusi retribusi pasar pasar terhadap pendapatan asli daerah upaya menuju kemandirian Daerah Kabupaten Simalungun.

3.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah:

- a) Data primer,

yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun secara langsung melalui teknik wawancara maupun observasi guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti, kemudian diolah lebih lanjut.

b) Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung namun melalui media perantara dari perusahaan. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain:

1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan realisasi retribusi pasar dan kinerja.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu :

1. Dokumen, yaitu arsip dispenda mengenai retribusi pasar
2. Buku-buku ilmiah
3. Makalah-makalah hasil penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui dua cara yaitu :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, terbuka, dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, responden atau informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaanya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai sistem serta proses penerimaan retribusi pasar beserta kinerjanya

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- 1) Teknik wawancara, yaitu penulis melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan seperti pada pimpinan dan karyawan-karyawan lain yang berhubungan dengan objek penelitian
- 2) Teknik observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap aktifitas perusahaan. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.
- 3) Penelitian kepustakaan diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian agar dapat mendekati kebenaran. Dilakukan dengan cara mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, meliputi buku-buku literatur, majalah-majalah serta sumber-sumber lain yang dapat melengkapi penelitian yang dibahas.

3.4. Teknik Analisis Data

- 1) Metode Analisis deskriptif-studi kasus yaitu dengan memecahkan kasus dengan menggunakan analisa rasio anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.
- 2) Analisis dilakukan dengan metode stastistik deskriptif yaitu data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai anggaran dan realisasi anggaran pada dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.
- 3) Penulis menggunakan metode regresi Linier Sederhana yaitu mencari koefisien determinasi untuk mengetahui anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.

- 4) Data-data tersebut akan dibandingkan seberapa besar kinerja dari 2015-2016 retribusi pasar.
- 5) Hasil penelitian ini selanjutnya disajikan didalam pelaporan realiasi kinerja retribusi pasar terhadap Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun.

3.5. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.5.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014: 119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada BKD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2011-2015.

3.5.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014: 120) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada BKD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2011-2015.

3.5.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014).

3.6. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi untuk permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

3.6.1. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

1. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah

daerah. Pada dasarnya, anggaran pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (Mahmudi, 2007: 123).

$$\text{Variasi pendapatan} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran pendapatan}$$

2. Pertumbuhan Pendapatan

Menurut Mahmudi (2007) Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya meningkat, atau sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan pendapatan thn } t = \frac{\text{pendapatan1 thn } t - \text{pendapatan thn } t-1}{\text{Pendapatan thn}}$$

Menurut saya Analisis Pertumbuhan Pendapatan adalah indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan dan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi.

3. Derajat Desentralisas

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratiningrum 2015).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel. 3.1
Kriteria penilaian efektifitas PAD

Kemampuan desentralisasi	Rasio derajat desentralisasi
Sangat Baik	>50%
Baik	25-50

Kurang Baik	10-25
Tidak Baik	<10

Sumber : Halim, 2007 dalam Sundari dan Supratiningrum (2015)

Menurut saya Derajat Desentralisasi adalah perbandingan antara jumlah pendapatan asli Daerah dengan total penerimaan Daerah.

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2011) Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisas penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria pemilihan efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

3.6.2. Analisis Kinerja Belanja Daerah

1. Analisis Varians Belanja

Menurut Mahmudi (2007) dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

2. Analisis keserasian belanja :

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja (Mahmudi, 2007).

Menurut Mahsun dalam Gramini, *et. al* (2017) Analisis keserasian belanja dikategorikan, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Keserasian Belanja

Kriteria Keserasian Belanja	Rasio Keserasian
Tidak Serasi	0%-20%
Kurang Serasi	>20%-40%
Cukup Serasi	>40%-60%
Serasi	>60%-80%

sumber: Mahsun, 2006 dalam Gramini, *et. al* (2017)

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi (2007) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai posisi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Mahsun, 2006 dalam Gramini, *et. al* (2017) menyebutkan bahwa Rasio belanja operasi dapat dihitung dengan rumus :

$$RBOTB = \frac{\text{Rasio Belanja Operasional}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Menurut saya RBOTB (Rasio Belanja Operasi Total Belanja) adalah perbandingan antara total operasi dengan total belanja daerah di kali 100%.

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Menurut Mahmudi (2007: 150) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah

yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Mahsun, 2006 dalam Gramini, *et. al* (2017) Rasio belanja modal terhadap total belanja dapat dirumuskan:

$$\text{RBMTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

RBMTB (Realisasi Belanja Modal Terhadap Total Belanja) adalah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah di kali 100%.

3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tapi relatif. Artinya tidak ada standart baku yang dianggap baik untuk rasio ini, hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasi telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007: 152). Rasio belanja dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

REB (Rasio Efisiensi Belanja) adalah perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dikali 100%.